

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PSAP NO. 5 PADA DINAS KESEHATAN KOTA MANADO***ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF INVENTORIES OF PSAP NO. 5 IN DINAS KESEHATAN KOTA MANADO*

Oleh:

**Angelina Deborah Umboh<sup>1</sup>  
Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[angelinadeboraumboh@gmail.com](mailto:angelinadeboraumboh@gmail.com)<sup>2</sup>[janjantinangon@gmail.com](mailto:janjantinangon@gmail.com)

**Abstrak:** Persediaan merupakan urat nadi pada perusahaan dagang, manufaktur, organisasi bisnis, dan juga instansi dibidang pelayanan pemerintah yang masuk di dalam aset lancar. Persediaan adalah pendukung dari kegiatan pelayanan dan juga jual beli, dan cukup berarti pada aset lancar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi persediaan sesuai PSAP No 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Objek dalam penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi persediaan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 5, yaitu persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

**Kata Kunci:** Perlakuan Akuntansi, Pengukuran Persediaan, Pernyataan Standar Akuntansi

**Abstract:** Inventory is the lifeblood of trading companies, manufacturers, business organizations, and also government service agencies that are included in current assets. Inventory is a support for service activities as well as buying and selling, and is significant for the company's current assets. This study aims to determine the accounting treatment of inventory according to PSAP No. 5 at the Manado City Health Office. The object of this research is the City Health Office of Manado. This research uses a qualitative descriptive method. The research results show that the accounting treatment of inventories is in accordance with the Government Accounting Standard Statement No. 5, namely inventories are recognized when the potential future economic benefits are obtained by the government and have a value or cost that can be measured reliably and when received or their ownership rights and / or ownership are transferred. .

**Keywords:** Accounting Treatment, Inventory Measurement, Accounting Standard Statement

## PENDAHULUAN

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan Otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dan pemerintah maka pemerintah mengeluarkan standar akuntansi pemerintah yang tertuang pada PP nomor 71 tahun 2010. Saat ini pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembelanjaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Ketentuan tentang penerapan SAP berbasis akrual dilakukan secara bertahap, pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, SAP lampiran I berbasis akrual diterapkan mulai peraturan tersebut disahkan dan selambat-lambatnya pada tahun 2014. Sedangkan SAP lampiran II berbasis kas menuju akrual hanya diterapkan hingga 2014. SAP lampiran II dapat tetap diterapkan hingga tahun 2014 apabila pada masa peralihan, rntitas tersebut belum siap menggunakan SAP berbasis akrual. Rumah sakit tergolong organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam upaya memberikan pelayanan publik perlu dilakukan pengukuran kinerja sektor publik untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan, membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sarannya yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. (Madiasmo, 2018:33).

Dinas Kesehatan Kota Manado adalah instansi pemerintah yang mengelola persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan merupakan urat nadi pada perusahaan dagang, manufaktur, organisasi bisnis, dan juga instansi dibidang pelayanan pemerintah yang masuk di dalam aset lancar. Persediaan adalah pendukung dari kegiatan pelayanan dan juga jual beli, dan cukup berarti pada aset lancar perusahaan. Persediaan adalah hal yang penting bagi pemerintah daerah termasuk Dinas Kesehatan Kota Manado. Jika di akhir periode catatan persediaan dengan inventarisasi fisik tidak sesuai, maka akan disesuaikan dengan inventarisasi fisik. berdasarkan pentingnya pengelolaan persediaan obat pada sektor publik yang berbasis pelayanan kepada masyarakat dan mulai berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan tentang akrual basis sehingga mendorong penulis untuk melakukan pengamatan tentang perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Manado

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi

American Accounting Association menyatakan akuntansi sebagai proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi. Charles T. Hongren, Walter T Harrison Jr, Linda Smith Bamber (2006:6) "akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan. Muhammad (2016:51), mendefinisikan akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Dari pengertian di atas terkandung tujuan utama akuntansi menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (economic information) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan sehingga akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

### **Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Secara umum pengertian akuntansi pemerintahan yaitu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahap melaksanakan anggaran (budget execution), yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Abdul Halim (2015:143) Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Akuntabilitas Dalam pemerintahan, keuangan Negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi tersebut dalam Negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5). Akuntansi pemerintahan sangat mungkin pemerintah untuk melaksanakan suatu perencanaan dalam bentuk susunan APBN dan strategi pembangunan lain, sebagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga mengendalikan atas aktivitas tersebut dalam rangka mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Pengawasan Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri atas pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan secara umum dan pemeriksaan operasional atau manajerial. (N Wulandari, M Hamid, 2018) Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Bachtiar Arif dkk adalah sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut. Revrisond Baswir (2016) Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Revrisond Baswir adalah akuntansi (pemerintahan termasuk akuntasi untuk lembaga non-profit pada umumnya) adalah bidang akuntansi yang berkaitan antara lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun suatu lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, tetapi sebagaimana dalam perusahaan hal tersebut tergolong ke dalam lembaga mikro.

### **Akuntansi Persediaan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari dua lampiran, yaitu Lampiran I mengatur kebijakan akuntansi yang menggunakan basis akrual sedangkan Lampiran 2 mengatur kebijakan akuntansi yang masih menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Adanya dua lampiran ini, menunjukkan sesuatu yang logis, karena meskipun dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberi amanat untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual lima tahun setelah diundangkannya UU tersebut, namun butuh waktu dan proses dalam menyiapkan sistem yang digunakan untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengakomodir masa transisi sekaligus merupakan tekad untuk melaksanakan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003.

Definisi Persediaan (Menurut Peraturan Pemerintah RI No 71 Th. 2010) : Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam PSAP NO. 05 tentang akuntansi persediaan menyatakan bahwa standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban. dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintahan pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Ruang Lingkup Persediaan PSAP 05 tentang persediaan diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Aset Digolongkan kedalam Persediaan Apabila:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

### **Pengukuran Persediaan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Persediaan dicatat sebesar jumlah uang yang menjadi nilai dari persediaan tersebut. Jumlah uang tersebut menunjukkan biaya yang dapat diukur secara andal atas perolehan/kepemilikan persediaan. Persediaan yang diperoleh dari pembelian disajikan sebesar harga perolehan, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan ditambah dengan biaya lain yang secara langsung dapat dibebankan pada persediaan serta dikurangi apabila ada potongan harga, rabat, atau pengurang lain yang serupa. Untuk persediaan yang diproduksi sendiri diukur sebesar harga pokok produksi, yaitu biaya langsung yang terkait dengan produksi persediaan ditambah biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Sedangkan persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya, pengukurannya menggunakan nilai wajar. Contoh persediaan berupa hewan dan tanaman dari hasil pengembangbiakan, persediaan dari donasi, dari rampasan dan lainnya. Pada akhir periode, apabila terdapat sisa persediaan, metode yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan akhir tersebut adalah metode First In First Out (FIFO) dan metode harga pembelian terakhir. Metode FIFO digunakan untuk jenis persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda, sedangkan harga pembelian terakhir digunakan untuk persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, seperti barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku dan barang dalam proses/setengah jadi.

### **Pencatatan Persediaan**

Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik (physical method) atau metode periodik (periodical method) artinya persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai "belanja" yang merupakan komponen atau nominal/temporer. Namun persediaan yang dibeli/diperoleh secara fisik diadministrasikan oleh bagian gudang/barang berdasarkan prinsip perpetual. Secara periodik (biasanya akhir tahun buku) berdasarkan hasil perhitungan fisik, nilai persediaan dicatat dalam akun "persediaan" di sisi debit, dan akun "cadangan" dicatat di sisi kredit.

### **Penyajian dan Pengungkapan Persediaan**

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil opname fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk persediaan, mengungkapkan, antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang juga dituangkan dalam CaLK.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang langsung bersumber pada Dinas Kesehatan Kota Manado berupa Laporan Realisasi Anggaran dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan dengan teori-teori dan kemudian di analisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 05 pada bagian umum menjelaskan bahwa Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Kesehatan Kota Manado, mengungkapkan bahwa: "Di kantor ini persediaannya dikategorikan dalam dua jenis, yaitu persediaan Alat Tulis Kantor dan persediaan obat-obatan"

**Tabel 1. Persediaan Dinas Kesehatan Kota Manado Tahun 2019**

Jenis Persediaan	Jumlah (Rp)
Obat-Obatan	5.363.520.000,-
Alat Tulis Kantor	2.135.678.800,-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Manado

Dinas Kesehatan Kota Manado membuat perencanaan anggaran persediaan berdasarkan kebutuhan persediaan di tahun anggaran yang akan datang seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris pada wawancara mengatakan bahwa: "perhitungan kebutuhan persediaan obat-obatan berdasarkan data pasien dari tahun ke tahun kemudian diestimasi untuk memperkirakan kebutuhan obat di tahun depan." Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Persediaan menyatakan bahwa dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis atau untuk tujuan berjaga-jaga, barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa persediaan yang digunakan di Dinas Kesehatan Kota Manado adalah berupa Obat-Obatan dan Alat Tulis Kantor (ATK). Dinas Kesehatan Kota Manado juga menganggarkan Persediaan cadangan untuk mengantisipasi peristiwa tak terduga seperti bencana alam dan mengakui cadangan obat-obatan sebagai Persediaan. Oleh karena itu dalam hal pengklasifikasian aset, Dinas Kesehatan Kota Manado dalam mengklasifikasi aset persediaan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP 05 tentang Persediaan

### Pengakuan Persediaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Dinas Kesehatan Kota Manado mengakui persediaan Obat-Obatan pada saat barang benar-benar diterima beserta kelengkapan dokumen-dokumennya, namun terlebih dahulu dilakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun ke depan berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian keuangan

Dalam perencanaan pemesanan obat, Dinas Kesehatan Kota Manado memperhitungkan persediaan yang dibeli agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di Dinas Kesehatan Kota Manado. Dinas Kesehatan Kota Manado memperhitungkan dengan rata-rata perbulan, namun dikalikan dengan satu setengah tahun yang ditunjukkan sebagai rata-rata kemungkinan yang dibutuhkan untuk tahun depan. Dari hasil tersebut, Dinas Kesehatan Kota Manado menuangkan hasil dari perhitungannya ke dalam Lembar permintaan obat yang ditujukan kepada bagian pemesan obat agar uang dari pemerintah pusat dapat dicairkan akan tetapi untuk perencanaan persediaan ATK, Dinas Kesehatan Kota Manado harus memperhitungkan anggaran dengan sesuai kebutuhan

### Pengukuran Persediaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa persediaan disajikan sebesar: 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan obat-obatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Manado diperoleh dengan pembelian, dalam pembelian obat, dinas tersebut sudah merinci dalam e-katalog (e-purchasing). Namun apabila obat-obatan yang dipesan tidak tersedia di e-katalog, maka dinas dapat membelinya di luar.

Dinas Kesehatan Kota Manado akan membayar apabila barang yang dipesan sudah datang terlebih dahulu dan sudah sesuai dengan kriteria yang dipesan. Untuk pelaporan barang tersebut, dinas tersebut mengungkapkannya sesuai dengan harga perolehan, karena barang yang didapatnya dari pembelian baik dari e-katalog maupun dari pihak luar

### **Pengungkapan Persediaan**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Dinas Kesehatan Kota Manado dalam mengungkapkan persediaan dengan stock opname per bulan hal ini seperti yang disampaikan oleh seorang pegawai bagian keuangan

### **Beban Persediaan**

PSAP 05 tentang persediaan, Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pernyataan tersebut sesuai dengan laporan yang disajikan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado bahwa pada laporan operasional juga mencantumkan beban persediaan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di atas, maka analisis dari penerapan akuntansi persediaan di Dinas Kesehatan Kota Manado merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, hal ini sesuai dengan PSAP No.5 bahwa Persediaan merupakan aset yang berupa: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Dinas Kesehatan Kota Manado mengakui persediaan obat-obatan pada saat barang benar-benar diterima beserta kelengkapan dokumennya hal ini sesuai dengan PSAP No.5 bahwa persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Manado disajikan sebagai biaya perolehan. Persediaan diperoleh dengan pembelian, Dinas Kesehatan Kota Manado sudah merinci dalam e-katalog (epurchasing) sehingga sudah sesuai dengan PSAP No. 5 bahwa Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 menyatakan bahwa laporan keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Pengungkapan persediaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado sesuai dikarenakan merinci persediaan yang ada pada catatan atas laporan keuangan

Beban Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 tentang Persediaan bahwa Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pencatatan Beban Persediaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado sudah sesuai dengan PSAP dikarenakan Dicantumkan Dalam Laporan Operasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penerapan akuntansi atas persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Manado sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Persediaan. Pengakuan persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Manado dapat diakui apabila barang persediaan sudah benar benar diterima dan sesuai dengan permintaan yang dipesan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 persediaan yaitu persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Pengukuran persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Manado sudah sesuai dengan standar pemerintahan menurut PSAP 05

### Saran

Dinas Kesehatan Kota Manado Untuk Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan seharusnya juga ditampilkan jumlah alat kesehatan, barang cetakan agar terperinci dan mudah untuk dipahami. Penelitian Selanjutnya Penelitian ini hanya difokuskan dalam akuntansi persediaan dimana peneliti memiliki batasan masalah yaitu tidak mengikuti proses kebijakan penerapan siklus akuntansi secara langsung. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Baswir, R. (2016). Akuntansi Pemerintahan Di Simpang Jalan. *Jurnal UNISIA*, (17), 85-90. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5321/4955> Tanggal Akses: 4 Januari 2021
- Horngren, Charles T., Walter T. Harrison Jr., Linda Smith Bamber, 2006, *Accounting*, fifth edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad R. Ointu. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada DPPKAD Kab.Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13662/13247>
- PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan. <http://www.ksap.org/standar/PSAP05.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wulandari, N., & Hamid, M. (2018). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016. *Doctoral dissertation*, STIE Widya Wiwaha). <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/227> Tanggal Akses: 4 Januari 2021

